



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

2024



Jalan Diponegoro No. 34 Tenggarong



www.inspektorat.kukarkab.go.id



(0541) – 661036



inspektorat@kukarkab.go.id

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 34 Telp. (0541) 661036 Fex 661787 Tenggarong Kode Pos 75514
Email : inspektorat@kukarkab.go.id Website : inspektorat.kukarkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : B-106/ITDA/SET.II/360.2/02/2023

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA)/
RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka setiap entitas akuntansi wajib menyusun dokumen perencanaan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) / Rencana Kerja (RENJA) dengan Surat Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) / Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : a. Tim Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) / Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tersebut dalam diktum pertama keputusan ini bertugas antara lain :
1. Menyiapkan bahan Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) / Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) / Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah;
 3. Menyusun Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) / Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat yang berisi program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Daerah;
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pengguna Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berhubungan dengan penyusunan dokumen perencanaan;
- b. Tim Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) / Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 berlaku dalam tahun 2023; (Terlampir)
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 20 Februari 2023



H. HERIANSYAH, S.E., M.Si., CGCAE., CPSp
Pembina Tingkat I
NIP. 197908012001121001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara di – Tenggarong
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kutai Kartanegara di – Tenggarong.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-106/ITDA/SET.II/360.2/02/2023
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA) DAN RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM

- A. Pengarah : Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
- C. Ketua : Inspektur Pembantu Wilayah III
- D. Wakil Ketua : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I
2. Inspektur Pembantu Wilayah II
3. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- E. Sekretaris : Perencana Muda Sub Koordinator Penyusunan Program & Keuangan
- F. Anggota : 1. Kepala Subbag. Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian
2. Perencana Muda Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan

INSPEKTUR,

H. HERIANSYAH, S.E., M.Si., CGCAE., CPSp
Pembina Tingkat I
NIP. 197908012001121001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024. Rencana Kerja ini memuat indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang tertuang dalam misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.

Inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi pengawasan sehingga rencana kerja Inspektorat daerah diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam satu tahun ke depan. Perubahan paradigma Inspektorat Daerah saat ini dengan menjalankan fungsi *quality assurance* atau Penjamin Mutu dan consulting partner atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *early warning system* atau sebagai peringatan dini. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa watch dog saat ini Inspektorat daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami menyadari bahwa rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih banyak perlu disempurnakan, meskipun demikian kami berharap dengan rencana kerja ini semua kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan yang kami buat mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman selanjutnya.

Tenggarong, Agustus 2023



H. Heriansyah, SE., M.Si., CGCAE., CPSP

Pemimpin Tingkat I

NIP. 197908012001121001

DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 LATAR BELAKANG.....	1
	1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
	1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
	1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
	2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	7
	2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN.....	27
	2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT.....	29
	2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	32
	2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	47
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN.....	48
	3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	48
	3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD.....	48
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	50
	4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	50
BAB V	PENUTUP.....	66
	A CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA.....	66
	B KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN.....	66
	C RENCANA TINDAK LANJUT.....	67

DAFTAR TABEL

		<u>Halaman</u>
Tabel TC - 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra-Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara.....	11
Tabel TC - 30	Pencapaian Kinerja Layanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara..	28
Tabel TC - 31	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara.....	33
Tabel TC - 32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara.....	47
Tabel TC - 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.....	53

BAB I. PENDAHULUAN

Dinamika perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi begitu cepat menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif, dan mengarah pada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber dana pembangunan yang jumlahnya terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan.

Inspektorat sebagai Instansi yang melakukan Pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah (PD) dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dimana saat ini Kinerja Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan masyarakat, pemerintah dituntut mampu untuk menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai *stakeholders*.

Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Sebagai prinsip dasar dari **Good Governance** Rencana Kerja Inspektorat ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis. Sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat periode 2021-2026.

Adapun hasil dari proses ini adalah berupa rencana kerja tahunan bagi Inspektorat dalam perencanaan kinerja merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang, dan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan. Sehingga pokok dari

perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Landasan hukum penyusunan dokumen Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Kerja Inspektorat ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya.

Dalam Rencana Kerja ini juga terdapat informasi – informasi yang akan memudahkan Inspektorat dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya dapat dilakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa maksud disusunnya Rencana Kerja ini antara lain adalah :

- (1) Sebagai penjabaran dari Rencana Strategik (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.
- (2) Mengoptimalkan tugas dan fungsi serta peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- (1) Menjabarkan visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ke dalam program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
- (2) Sebagai satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui pelaksanaan tugas – tugas Pembinaan dan Pengawasan.
- (4) Sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (5) Menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mewujudkan Good Governance.
- (6) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam Dokumen *Rencana Kerja (Renja)* Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan Renja Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara serta sistematika penyusunan Renja.
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**
Dalam Bab ini memuat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.
- BAB III TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH**
Dalam bab ini memuat Telaahan terhadap Kebijakan nasional dan Tujuan dan Sasaran Renja PD
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
Bab ini memuat Program dan Kegiatan.
- BAB V PENUTUP**
Dalam bab ini berisikan Catatan yang penting yang perlu mendapat perhatian, Kaidah pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.

**BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) adalah penjabaran Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis PD tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan penyusunan program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang sah dalam mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal yaitu pencapaian kinerja output dan pencapaian kinerja keuangannya. Yang dimaksud dengan kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan.

Untuk pencapaian dari masing-masing Program kegiatan tahun 2022 telah dijabarkan pada penjelasan dibawah ini.
Program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pagu Anggaran yang disediakan untuk program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah APBD Perubahan adalah sebesar Rp. **21.603.954.670,-** dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **19.165.089.926,-** atau tercapai **88,7 %**.
Sedangkan untuk capaian kinerja dari program ini yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat dari target nilai 80 hasil evaluasi implementasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kuta Kartanegara Tahun 2021 yang dilakukan penilaian pada tahun 2022 memperoleh nilai **84,90** dengan kategori A dan dapat diinterpretasikan Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
Pencapaian ini dapat dilakukan dengan dilaksanakan kegiatan dalam program ini sesuai rencana dengan kerjasama semua pihak yang terkait demi pencapaian kinerja. Selain yang mencakup Hasil Evaluasi Sakip Inspektorat kemudian tercapainya target Penilaian Kapabilitas APIP ke Level 3 dari Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri oleh BPKP yakni APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Pagu Anggaran Perubahan yang disediakan untuk program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp. **3.215.713.000,-** dengan realisasi sebesar Rp. **1.322.995.260,-** atau mencapai **41,1%**.
Sedangkan untuk Kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan target **55%** Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP tercapai seratus persen dari target yang berarti telah tercapai target sesuai yang direncanakan. Kegiatan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dilaksanakan sesuai rencana dengan kerjasama semua yang terkait dan juga adanya Komitmen Perangkat Daerah diantaranya dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dimana Pencapaian Evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh BPKP telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Level 3 (Terdefinisi), juga dalam Penilaian MCP (Monitoring Center for Prevention), Pencapaian Target LHKASN, serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

3. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Pagu APBD Perubahan pada program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp. **8.533.907.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **5.641.942.017,-** atau **66,1%**.

Kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan target 96 % dan pencapaian target sebesar 93% rata-rata tercapainya target kegiatan pada program ini, yang berarti pencapaian program ini sebesar 97% menunjukkan tidak tercapainya target kinerja dari yang direncanakan. Pencapaian program kegiatan ini walaupun belum maksimal tetapi menunjukkan adanya Komitmen Para Pihak yang bertanggung jawab diantaranya dalam hal menindaklanjuti penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP, Penanganan Laporan Aduan Masyarakat, Pencapaian Ketepatan waktu Pelaporan Keuangan serta Penerapan Peraturan Pengelolaan Pemerintah Desa.

Faktor penyebab ataupun kendala pencapaian target pada program ini adalah adanya Keperluan Penugasan Pengawasan yang harus dilaksanakan dimana waktunya secara bersamaan dengan keperluan tenaga pengawas yang berkompeten sesuai dengan keperluan penugasan tersebut.

Hal ini dapat berimplikasi atau berakibat tidak tertanganinya penugasan pengawasan yang diharapkan dapat diselesaikan. Sehingga pencapaian target Renstra bisa tidak terpenuhi.

Adapun kebijakan / tindakan kedepannya yaitu pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga pengawas harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan diupayakan untuk penambahan jumlah tenaga pengawasan yang berkompeten.

Sedangkan untuk jangka waktu pendek dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara join audit dengan tenaga pengawas lainnya.

Berikut disajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel TC - 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra-Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama OPD : Inspektorat Daerah

Lembar :

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja-PD Tahun (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan									
6.01	Inspektorat Daerah									
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90 Nilai	78 Nilai	80 Nilai	84,90 Nilai	100	82 Nilai	82 Nilai	91
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3 Level	2 Level	3 Level	3 Level	100	3 Level	3 Level	100

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja-PD Tahun (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja	30 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	18 Dokumen	60
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	12 Dokumen	60
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	60
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	9 Laporan	60

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja-PD Tahun (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan	98 Orang/bulan	95 Orang/bulan	95 Orang/bulan	100	98 Orang/bulan	98 Orang/bulan	100
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	5 Laporan	50

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja-PD Tahun (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60
6.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	9 Dokumen	60
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	35 Orang	30 Orang	30 Orang	100	30 Orang	95 Orang	63

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja-PD Tahun (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	100	35 Orang	105 Orang	60
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	175 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	100	35 Orang	105 Orang	60
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	100	6 Layanan	6 Layanan	100
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 Paket	5 Paket	4 Paket	4 Paket	100	4 Paket	13 Paket	65

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja-PD Tahun (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75 Paket	39 Paket	19 Jenis	19 Jenis	100	15 Paket	73 Paket	97
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Paket	20 Paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	24 Paket	120
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	60
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	98 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	100	50 Laporan	198 Laporan	79

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja-PD Tahun (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.250 Dokumen	3 Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	100	250 Dokumen	503 Dokumen	40
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150 Unit	3 Unit	30 Unit	30 Unit	100	30 Unit	63 Unit	42
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	150 Unit	3 Unit	30 Unit	30 Unit	100	30 Unit	63 Unit	42

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja-PD Tahun (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja-PD Tahun (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100	15 Unit	15 Unit	100
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100	6 Unit	6 Unit	100

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja-PD Tahun (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100	6 Unit	6 Unit	100
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	2 Unit	100

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja-PD Tahun (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06:01:02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	97 Persen	100 Persen	96 Persen	93 Persen	97	96 Persen	96 Persen	99
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan	70 Dokumen	113 Dokumen	210 Dokumen	207 Dokumen	99	70 Dokumen	70 Dokumen	100
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100	5 Laporan	5 Laporan	100
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Laporan	40 Laporan	87 Laporan	87 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja-PD Tahun (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100	16 Laporan	16 Laporan	100
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	25 Laporan	59 Laporan	59 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	38 Laporan	25 Laporan	38 Laporan	38 Laporan	100	38 Laporan	38 Laporan	100
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	9 Kesepakatan	-	3 Kesepakatan	0 Kesepakatan	-	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	33

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja-PD Tahun (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	19 Dokumen	2 Dokumen	19 Dokumen	18 Dokumen	95	19 Dokumen	19 Dokumen	100
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja-PD Tahun (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	30 Laporan	15 Laporan	14 Laporan	93,33	15 Laporan	15 Laporan	100
06:01:03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	100 Persen	50 Persen	55 Persen	55 Persen	100	65 Persen	65 Persen	65
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja-PD Tahun (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	-	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	15 Rekomendasi	-	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	83 Dokumen	4 Dokumen	77 Dokumen	77 Dokumen	100	83 Dokumen	83 Dokumen	100
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	56 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	100	56 Perangkat Daerah	56 Perangkat Daerah	100

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja-PD Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan (2023)	
					Target Renja-PD Tahun (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	13 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	100	13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	100
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	1 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	100	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada awal Penyusunan RENJA tahun 2022 telah menargetkan 78 % untuk persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, sedangkan realisasinya adalah sebesar 89,37%, artinya capaian kinerja sudah melampaui dari target yang ditetapkan.

Untuk persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP juga mengalami peningkatan karena realisasinya melampaui yang ditarget 67 % tingkat penyelesaiannya menjadi 76,69 %.

Persentase Jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, target tidak terpenuhi dari yang ditargetkan 90 % tercapai 87,50 %, Hal ini terjadi karena adanya Keperluan Penugasan Pengawasan yang harus dilaksanakan dimana waktunya secara bersamaan dengan keperluan tenaga pengawas yang berkompeten sesuai dengan keperluan penugasan tersebut sehingga permasalahan pengaduan tersbut tidak tertangani dengan baik.

Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah mencapai target yang telah ditetapkan, yakni dari 3 Nilai yang ditargetkan dengan capaian 3 Nilai.

Tabel TC - 30

Pencapaian Kinerja Layanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator *)	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA – PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2		3	5	6	7	7	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah		Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	78	80	82	84	89,37	-	82	84	Target Terpenuhi
			Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	67	71	74	77	76,69	-	74	77	Target Terpenuhi
			Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	90	92	94	96	87,50	-	94	96	Target Tidak terpenuhi
			Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	4	3	-	3	4	Target Terpenuhi

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Salah satu kondisi yang menjadi perhatian saat ini adalah pemulihan pasca pandemi covid-19 merupakan tantangan yang menyebabkan implikasi meluas di bidang sosial, ekonomi dan keuangan, namun hal ini tidak boleh mengkompromikan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan yang baik.

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat sebagai unsur Pengawasan dan Pembinaan bagi Perangkat Daerah lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara maka isu-isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara 5 tahun kedepan antara lain:

1. Kerawanan dalam penggunaan anggaran pemulihan pasca pandemi covid-19 antara lain:
 - a. Potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, dimana kerawanan tersebut terletak pada kolusi dengan penyedia, Marck-up harga dan benturan kepentingan dalam pengadaan serta kecurangan;
 - b. Pemberian sumbangan atau donasi dimana kerawanan tersebut dalam pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan, hingga penyelewengan bantuan;
 - c. Korupsi pada proses refocusing dan relokasi anggaran pemulihan pasca pandemi covid-19, dimana titik rawannya terletak pada alokasi sumber dana dan belanja hingga pemanfaatan anggaran tersebut;
 - d. Penyelenggaraan bantuan social dimana titik rawannya dari proses pendataan, klarifikasi dan validasi data hingga distribusi bantuan agar bantuan social diterima oleh masyarakat;
2. Masih banyaknya permasalahan atas hasil pemeriksaan BPK RI yang terindikasi tindak pidana korupsi yang bersifat material;
3. Masih kurangnya respon Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan internal maupun eksternal;

4. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan perangkat daerah;
5. Identifikasi resiko dan penilaian resiko belum maksimal dilaksanakan terutama terhadap program dan kegiatan di perangkat daerah;
6. Belum optimalnya manajemen perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP sebagai landasan terwujudnya Good Governance;
7. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Terkait dengan kinerja penyelenggaraan publik, Inspektorat juga memiliki tugas pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kabupaten Kutai Kartanegara. Pembinaan ini menjadi salah satu hal yang sangat mengemuka terutama dengan semakin sadarnya publik akan kualitas pelayanan yang mereka terima dari penyelenggara pelayanan publik.

selain isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu :

1. Faktor Internal

- a. Terbatasnya aparatur pengawas dibandingkan cakupan luasan wilayah dan obyek pengawasan, dimana Dengan Luasan wilayah Pengawasan dan jumlah Auditan yang terdiri dari 38 Perangkat Daerah, 18 Kecamatan, 193 Desa, dan 32 Puskesmas serta 3 Rumah sakit sebagai pelaksana BLUD, juga lebih dari 500 Sekolah sebagai penerima Dana BOS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu permasalahan tersendiri bagi kegiatan Pengawasan / pembinaan yang dilaksanakan Inspektorat dalam rangka mengemban amanat pengawasan yang dituangkan dalam Kebijakan Pengawasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri pada point Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah.

- b. Selain itu adanya permasalahan yang semakin kompleks dan beragam serta perubahan peraturan yang berlaku, mewajibkan Inspektorat harus mempersiapkan Sumber Daya Aparatur pengawas yang profesional dan handal dalam melaksanakan kegiatan pengawasan/pembinaan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga memerlukan anggaran yang cukup untuk mengikuti Diklat Penjenjangan maupun Diklat teknis yang terkait dengan Pengawasan.

2. Faktor Eksternal

- a. Belum maksimalnya penerapan SPIP di OPD dimana adanya temuan-temuan berulang hasil pemeriksaan merupakan indikator bahwa SPIP belum diterapkan / diselenggarakan secara efektif. Hal ini merupakan amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan tupoksi OPD.
- b. Masih tidak optimalnya respon Perangkat Daerah terhadap penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, maupun Hasil Pemeriksaan APIP.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
3. Mewujudkan Inspektorat sebagai Counsultant Partner.
4. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd

Adapun perbandingan antara Rancangan Awal RKPd 2024 dengan Hasil analisis Kebutuhan 2024 Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

- a) Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota telah mengalami penyesuaian pagu anggaran dan penambahan Sub Kegiatan antara lain :
 - 1) Penyesuaian pagu anggaran di Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, berdasarkan hasil perhitungan dari BPKAD sebesar Rp. 14.625.900.195,-
 - 2) Penambahan Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 725.000.000,- keperluan Pengadaan Pakaian Dinas bagi karyawan Inspektorat Daerah Kab. Kukar karena dalam kurun waktu lebih dari 6 tahun belum ada pengadaan pakaian dinas.
- b) Untuk Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi di Kegiatan Pendampingan dan Asistensi telah mengalami penyesuaian pagu Sub Kegiatan dengan indikator serta satuan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 pada Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Tabel TC - 31

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	20.623.931.658	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	32.775.909.066,96	
			Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3 Level				Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3 Level		
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	200.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	200.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	100.000.000	

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	100.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	100.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	3 Laporan	14.810.245.362	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	3 Laporan	15.035.280.595	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260 Orang/bulan	14.400.864.962	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260 Orang/bulan	14.625.900.195	Menyesuaikan Hasil Perhitungan dari BPKAD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	309.380.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	309.380.400	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	40.800.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	40.800.000	
6	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40.800.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40.800.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.100.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.025.000.000	

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	725,000,000	Keperluan Pengadaan Pakaian Dinas Bagi Karyawan Inspektorat Daerah Kab. Kukar Karena dalam Kurun Waktu lebih dari 6 Tahun belum ada Pengadaan Pakaian Dinas
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	1.000.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	1.200.000.000	Perlu tambahan target dan anggaran sesuai analisis kebutuhan
9	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	100.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	100.000.000	
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	1.000.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	1.000.000.000	

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	981.833.340	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	981.833.340	
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	25.000.000	Perlu penambahan target dan anggaran sesuai analisis kebutuhan
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	Perlu penambahan target dan anggaran sesuai analisis kebutuhan
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	166.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	266.000.000	Perlu penambahan target dan anggaran 1. Bel. Perabot Kantor. 2. Bel. Makan minum rapat. 3. Bel. Jamuan Tamu
14	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.833.340	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	SKPD Inspektorat	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.833.340	

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	500.000.000	
16	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen	100.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen	100.000.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30 Unit	500.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31 Unit	11.297.251.175,96	
17	-	-	-	-	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.797.251.175,96	Perencanaan dan Pengadaan Gedung Kantor Baru ex PMI
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	500.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	500.000.000	

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.091.052.956	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.135.743.956	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	270.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	314.691.000	Perlu Tambahan Pagu Listrik dan Air
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	671.052.956	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	671.052.956	

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	15 Unit	900.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	15 Unit	900.000.000	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	250.000.000	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD Inspektorat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD Inspektorat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	250.000.000	

2024
RANCANGAN AKHIR RENJA

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	
23	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	
II	Program Penyelenggaraa n Pengawasan		Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	96 Persen	10.200.000.000	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	96 Persen	10.450.000.000	
9	Penyelenggaraa n Pengawasan Internal		Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan	70 Dokumen	8.500.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan	70 Dokumen	8.750.000.000	

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	5 Laporan	1.250.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	5 Laporan	1.250.000.000	
25	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Laporan	1.250.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Laporan	1.250.000.000	
26	Reviu Laporan Kinerja	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	16 Laporan	1.500.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	16 Laporan	1.500.000.000	
27	Reviu Laporan Keuangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	1.500.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	1.500.000.000	
28	Pengawasan Desa	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	38 Laporan	1.250.000.000	Pengawasan Desa	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	40 Laporan	1.500.000.000	Perlu Penambahan Pagu dan Target (40 Laporan, Penambahan pagu 250 jt)

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Kerjasama Pengawasan Internal	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	250.000.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	250.000.000	
30	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	1.500.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	1.500.000.000	
10	Penyelenggaraa n Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah dokumen Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	19 Dokumen	1.700.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah dokumen Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	19 Dokumen	1.700.000.000	
31	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	200.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	1.500.000.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	1.500.000.000	
III	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	75 Persen	3.500.000.000	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	75 Persen	3.500.000.000	
11	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	4 Dokumen	800.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	4 Dokumen	800.000.000	
33	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	300.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	300.000.000	
34	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	500.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	500.000.000	

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	83 Dokumen	2.700.000.000	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	83 Dokumen	2.700.000.000	
35	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	56 Perangkat Daerah	1.200.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	56 Perangkat Daerah	1.000.000.000	Penyesuaian Pagu Sub Kegiatan dengan Indikator serta Satuan Berdasarkan Kepmendagr i 050-5889
36	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	13 Perangkat Daerah	500.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	13 Perangkat Daerah	400.000.000	Penyesuaian Pagu Sub Kegiatan dengan Indikator serta Satuan Berdasarkan Kepmendagr i 050-5889

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	500.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	1.000.000.000	Penyesuaian Pagu Sub Kegiatan dengan Indikator serta Satuan Berdasarkan Kepmendagri 050-5889
38	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	500.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Perangkat Daerah	300.000.000	Penyesuaian Pagu Sub Kegiatan dengan Indikator serta Satuan Berdasarkan Kepmendagri 050-5889
Jumlah					34.323.931.658	Jumlah				46.725.909.066,96	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memiliki Usulan Program dan Kegiatan kepada Masyarakat.

Tabel TC - 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-	-	-	-	Nihil

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program kegiatan dan jenis pelayanan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara bila dikaitkan dengan Renstra Kementarian/Lembaga sangat relevan hal ini sesuai dengan kewenangan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kebijakan Pengawasan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai pedoman penganggaran kegiatan pengawasan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan 5 lima tahun. Berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, maka tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia” dan Misi “Memantapkan Birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani” maka ditetapkan tujuan yaitu “Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif, Inovatif dan Melayani”.

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu tertentu, misalnya tahunan, semesteran, atau triwulanan.

Adapun sasaran untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2024 yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan.

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan rumusan Program dan Kegiatan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Pengawas Pengelolaan Pembangunan daerah telah merumuskan Program dan kegiatan periode tahun 2021 – 2026 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemilihan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja ini adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran serta Rencana Strategis yang telah ditetapkan dan juga merupakan salah satu pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Dimana rumusan program dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah dengan menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Renja Kerja tahun 2024 ditetapkan 3 program yang telah disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang terbagi atas Program Prioritas yang merupakan program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah, dan Program Penunjang sebagai program kegiatan yang menopang Program Prioritas.

- b. Uraian garis besar rekapitulasi Program dan Kegiatan yang terdiri dari :

 Program Prioritas.

Rencana program prioritas yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 sebanyak 2 program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 kegiatan 9 Sub Kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp. 10.450.000.000,-
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri dari 2 kegiatan 6 Sub Kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp. 3.500.000.000,-

 Program Penunjang.

Selain Program Prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga di dukung dengan program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 8 Kegiatan 25 Sub Kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp. 32.775.909.066,96

- c. Untuk Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi di Kegiatan Pendampingan dan Asistensi telah mengalami penyesuaian pagu Sub Kegiatan dengan indikator serta satuan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 yaitu pada Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah mengalami penambahan Sub Kegiatan dan pagu anggaran antara lain :

- 1) Adanya penyesuaian pagu anggaran di Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, menyesuaikan hasil perhitungan dari BPKAD sebesar Rp. 14.625.900.195.
- 2) Untuk Penambahan Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 725.000.000,- dan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.797.251.175,96.

Tabel TC - 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024

Dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah		85 Nilai	32.775.909.066,96			88 Nilai	20.623.931.658
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3 Level				3 Level	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja		6 Dokumen	200.000.000			6 Dokumen	200.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	100.000.000	APBD Kukar		4 Dokumen	100.000.000

2024
RANCANGAN AKHIR RENJA

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	100.000.000	APBD Kukar		2 Laporan	100.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		3 Laporan	15.035.280.595			3 Laporan	14.810.245.362
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD Inspektorat	1260 Orang/bulan	14.625.900.195	APBD Kukar	Menyesuaikan Hasil Perhitungan dari BPKAD	1260 Orang/bulan	14.400.864.962
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	100.000.000	APBD Kukar		1 Laporan	100.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	SKPD Inspektorat	2 Laporan	309.380.400	APBD Kukar		2 Laporan	309.380.400

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		1 Dokumen	40.800.000			1 Dokumen	40.800.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SKPD Inspektorat	1 Laporan	40.800.000	APBD Kukar		1 Laporan	40.800.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Dokumen	3.025.000.000			3 Dokumen	2.100.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	SKPD Inspektorat	2 Paket	725.000.000	APBD Kukar	Keperluan Pengadaan Pakaian Dinas Bagi Karyawan Inspektorat Daerah Kab. Kukar Karena dalam Kurun Waktu lebih dari 6 Tahun belum ada Peremajaan Pakaian Dinas	0 Paket	0

2024
RANCANGAN AKHIR RENJA

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	60 Orang	1.200.000.000	APBD Kukar	Perlu tambahan target dan anggaran sesuai analisis kebutuhan	30 Orang	1.000.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	35 Orang	100.000.000	APBD Kukar		35 Orang	100.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	35 Orang	1.000.000.000	APBD Kukar		35 Orang	1.000.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		6 Layanan	1.141.833.340			6 Layanan	981.833.340
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	SKPD Inspektorat	1 Paket	25.000.000	APBD Kukar	Perlu penambahan target dan anggaran sesuai analisis kebutuhan	1 Paket	15.000.000

2024
RANCANGAN AKHIR RENJA

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SKPD Inspektorat	1 Paket	200.000.000	APBD Kukar	Perlu penambahan target dan anggaran sesuai analisis kebutuhan	1 Paket	150.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	SKPD Inspektorat	2 Paket	266.000.000	APBD Kukar	Perlu penambahan target dan anggaran 1. Bel. Perabot Kantor. 2. Bel. Makan minum rapat. 3. Bel. Jamuan Tamu	2 Paket	166.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	SKPD Inspektorat	1 Paket	50.833.340	APBD Kukar		1 Paket	50.833.340
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	50 Laporan	500.000.000	APBD Kukar		50 Laporan	500.000.000

2024
RANCANGAN AKHIR RENJA

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	250 Dokumen	100.000.000	APBD Kukar		250 Dokumen	100.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		31 Unit	11.297.251.175,96			30 Unit	500.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	SKPD Inspektorat	1 Unit	10.797.251.175,96	APBD Kukar	Perencanaan dan Pengadaan Gedung Kantor Baru ex PMI (Perlu Penambahan Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor)	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	SKPD Inspektorat	30 Unit	500.000.000	APBD Kukar		30 Unit	500.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan	1.135.743.956			12 Bulan	1.091.052.956

2024
RANCANGAN AKHIR RENJA

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	SKPD Inspektorat	12 Laporan	314.691.000	APBD Kukar	Perlu Tambahan Pagu Listrik dan Air	12 Laporan	270.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SKPD Inspektorat	12 Laporan	150.000.000	APBD Kukar		12 Laporan	150.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	SKPD Inspektorat	12 Laporan	671.052.956	APBD Kukar		12 Laporan	671.052.956
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		15 Unit	900.000.000			15 Unit	900.000.000

2024
RANCANGAN AKHIR RENJA

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	SKPD Inspektorat	6 Unit	250.000.000	APBD Kukar		6 Unit	250.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	SKPD Inspektorat	6 Unit	250.000.000	APBD Kukar		6 Unit	250.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	SKPD Inspektorat	1 Unit	200.000.000	APBD Kukar		1 Unit	200.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	SKPD Inspektorat	2 Unit	200.000.000	APBD Kukar		2 Unit	200.000.000
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan		96 Persen	10.450.000.000			97 Persen	10.200.000.000

2024
RANCANGAN AKHIR RENJA

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan		70 Dokumen	8.750.000.000			70 Dokumen	8.500.000.000
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	5 Laporan	1.250.000.000	APBD Kukar		5 Laporan	1.250.000.000
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	3 Laporan	1.250.000.000	APBD Kukar		3 Laporan	1.250.000.000
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	16 Laporan	1.500.000.000	APBD Kukar		16 Laporan	1.500.000.000
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	3 Laporan	1.500.000.000	APBD Kukar		3 Laporan	1.500.000.000

2024

RANCANGAN AKHIR RENJA

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	40 Laporan	1.500.000.000	APBD Kukar		38 Laporan	1.250.000.000
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	3 Kesepakatan	250.000.000	APBD Kukar		3 Kesepakatan	250.000.000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	1.500.000.000	APBD Kukar		2 Dokumen	1.500.000.000
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		19 Dokumen	1.700.000.000			19 Dokumen	1.700.000.000
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	4 Laporan	200.000.000	APBD Kukar		4 Laporan	200.000.000

2024
RANCANGAN AKHIR RENJA

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	15 Laporan	1.500.000.000	APBD Kukar		15 Laporan	1.500.000.000
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan SPIP		75 Persen	3.500.000.000			85 Persen	3.500.000.000
<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan</i>	<i>Jumlah dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan</i>		4 Dokumen	800.000.000			4 Dokumen	800.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Rekomendasi	300.000.000	APBD Kukar		1 Rekomendasi	300.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	3 Rekomendasi	500.000.000	APBD Kukar		3 Rekomendasi	500.000.000

2024
RANCANGAN AKHIR RENJA

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	<i>Jumlah dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</i>		83 Dokumen	2.700.000.000			83 Dokumen	2.700.000.000
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	56 Perangkat Daerah	1.000.000.000	APBD Kukar	Penyesuaian Pagu Sub Kegiatan dengan Indikator serta Satuan Berdasarkan Kepmendagri 050-5889	56 Perangkat Daerah	1.000.000.000
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	13 Perangkat Daerah	400.000.000	APBD Kukar	Penyesuaian Pagu Sub Kegiatan dengan Indikator serta Satuan Berdasarkan Kepmendagri 050-5889	13 Perangkat Daerah	400.000.000

2024
RANCANGAN AKHIR RENJA

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	4 Kegiatan	1.000.000.000	APBD Kukar	Penyesuaian Pagu Sub Kegiatan dengan Indikator serta Satuan Berdasarkan Kepmendagri 050-5889	4 Kegiatan	1.000.000.000
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	10 Perangkat Daerah	300.000.000	APBD Kukar	Penyesuaian Pagu Sub Kegiatan dengan Indikator serta Satuan Berdasarkan Kepmendagri 050-5889	10 Perangkat Daerah	300.000.000
JUMLAH				46.725.909.066,96				35.048.931.658

BAB V. PENUTUP

A. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun langkah-langkah melalui tahapan kebijakan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam periode tahun ini yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran dan fungsi sebagai APIP terkait penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) dan Konsultasi (*Consulting*) terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Meningkatkan peran dan fungsi sebagai APIP terkait aerly warning System
3. Meningkatkan peran dan fungsi sebagai APIP terkait penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) dan Konsultasi (*Consulting*) terhadap laporan akuntabilitas kinerja PD.
4. Mengembangkan kapasitas, potensi dan kompetensi sumber daya manusia aparatur pengawas.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar operasional pengawasan.
6. Meningkatkan tunjangan aparatur pengawasan.
7. Mendorong stakeholder/masyarakat untuk berperan serta dalam pengawasan.

B. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti kaidah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan selanjutnya Renja ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tahun Anggaran 2024.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Adapun strategi yang merupakan langkah sistematis yang ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara agar program dapat dilaksanakan demi tercapainya tujuan dan sasaran adalah :

1. Melakukan kegiatan Pengawasan, Reviu, Monitoring dan Evaluasi.
2. Melakukan kegiatan konsultasi, pendampingan dan pembinaan.
3. Menyelenggarakan atau mengikutsertakan aparatur pengawasan dalam pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.
4. Penyediaan peralatan dan bahan penunjang kinerja pengawasan.
5. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait peran serta pengawasan masyarakat.

Dengan disusunnya Rencana Kerja 2024 ini diharapkan pelaksanaan Program dan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta terkoordinasi sesuai dengan tujuan dan sasaran berikut berbagai indikator yang telah ditetapkan, serta nantinya dapat mengakomodasikan berbagai aspirasi, perkembangan maupun perubahan yang terjadi, yang belum terprediksi dalam Renstra.

Tenggarong, Agustus 2023


Inspektur
H. Heriansyah, SE., M.Si., CGCAE., CPSp
Pembina Tingkat I
NIP. 197908012001121001